

SKRIPSI

**KERJASAMA ANTARA LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA
BERENCANA DI KAB. GOWA**



Nomor Induk Mahasiswa : 105610475313

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

SKRIPSI

**KERJASAMA ANTARA LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA
BERENCANA DI KAB. GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh:

WAHYUNIGSIH

Nomor Induk Mahasiswa : 105610475313

25/05/2021

1 exp
Smb-Alumni

R/0086/ADN/21 CD
WAH

6^o

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

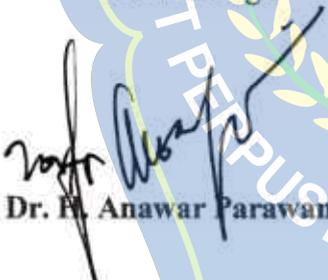
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kerjasama Antar Lembaga dalam Pelaksanaan
Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Wahyuningsih
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 04753 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Dr. H. Anawar Parawangi, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos, MPA

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos, MPA

NBM:730727

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0160/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari sabtu, tanggal 27 bulan Februari tahun 2021.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM. (Ketua)
2. Drs. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si.
3. Nasrul Haq, S.Sos., MPA
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP


()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KERYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUNIGSIH

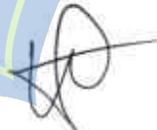
Stambuk : 105610475313

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar ademik.

Makassar, 22 Januari 2020

Yang Menyatakan


WAHYUNINGSIH

ABSTRAK

WahyuNingsih. Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana Di KabupatenGowa (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Nasrulhaq).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Kerjasama (2) Kepercayaan dan (3) Kekompakan.

Kata Kunci: Kerjasama, Pelaksanaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Kerjasama	8
C. Konsep kelembagaan	17
D. Konsep Keluarga Berencana	24
E. Kerangka Pikir	32
F. Fokus Penelitian	34
G. Deskripsi Fokus	34
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36

B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informasi Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengabsaan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	43
B. Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Informan Penelitian.....	38
1.2 Jumlah Penduduk Dan Seks Ratio.....	58
1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	59



DAFTAR GAMBAR

1.2 Kerangka Pikir 33



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kerjasama merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan atau sasaran telah direncanakan dan disepakati secara bersama. Selain itu kerjasama dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bisa mencapai tujuan demi keuntungan bersama. Di dalam suatu perusahaan maupun lembaga-lembaga, kerjasama tim sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk bisa berhasil di dalam mencapai tujuan. Kerjasama sebuah tim akan menjadi dorongan yang akan menjadi energi atau pun motivasi bagi setiap individu yang tergabung di dalam sebuah tim kerja tersebut. Apabila sebuah kerjasama tim bisa berjalan dengan baik maka kelancaran dalam berkomunikasi maupun rasa bertanggung jawab kepada setiap individu yang ada di dalam sebuah im kerja akan bisa terbentuk. dalam lingkungan masyarakat seringkali kita menemukan bentuk dari kerjasama, karna contoh dari kerjasama banyak sekali, seperti contoh misalnya dari kerjasama di antaranya yakni kerjasama dalam pembangunan gotong royong dan lainnya. Adapun juga kerjasama dari berbagai unsur dari unsur yang baru pada kepemimpinan suatu organisasi, hal ini menjadi sebuah upaya mengindari terjadinya sebuah kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi.

pemerintahan idealnya kewenangan (*authority*) melahirkan kekuasaan (*power*) ,bukan sebaliknya kekuasaan melahirkan kewenangan karena akan menciptakan tindakan seseorang atau beberapa orang sehingga yang bersangkutan itu merasakan ada semacam pemaksaan. Kekuasaan dalam kelembagaan dapat di artikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki tingkat jenjang kepemimpinan menggerakkan bawahan sehingga mau mengikuti apa yang di perintahkan, apabila kekuasaan itu di lakukan atau di laksanakan berdasarkan batasan-batasan kewenangan ,maka tindakan pimpinan yang di lakukan itu akan memberikan manfaat untuk pengembangan kelembangan khususnya kelembangan pemerintah. Memang kita tidak bisa menyangkal juga bahwa sangat banyak para anggota kelembagaan baik itu di bidang perusahaan swasta maupun di bidang pemeritahan yang menyatakan tentang ketidaksenangan terhadap kekuasaan pimpinan yang berlebihan.

Lembaga atau organisasi ,kepemimpinan adalah unsure penting , sebab tanpa adanya kepemimpinan dari seseorang pemimpin maka suatu lembaga atau organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Kepemimpinan bukan jatuh dari langit ia harus tumbuh dalam pribadi seseorang menuntut bakat tertentu, tetapi di samping itu pula pembinaan baik lewat pendidikan maupun lewat pengalaman sehari-hari. Karena pemimpin merupakan factorkritis) (*crucial factor*) yang dapat menentukan maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk organisasi social maupun berbentuk lembaga pemerintahan dan badan korporasi jadi pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang tiba-tiba dan mengoreksi

kelemahan sanggup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang sudah di tentukan. Suatu kelembagaan yang baik akan dapat meningkatkan investasi dan mempercepat kemajuan teknologi suatu bangsa. Acemoglu dan Robinson (2012) secara eksplisit menyebutkan kelembagaan menjadi sumber terpenting yang menentukan suatu Negara, bangsa gagal atau maju perekonomiannya. Oleh karena itu kelembagaan secara dinamis mengalami perubahan menuju pada peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan.

Keluarga berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (WHO, 2009). Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melainkan juga memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas (Yuhedidan Kurniawati, 2013).

Kepadatan penduduk yang terjadi tentu saja menjadi suatu masalah bagi Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut dengan cara melakukan program keluarga berencana atau dikenal dengan singkat KB.

Program keluarga berencana (kb) adalah program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta sebagai upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat harus di latih berpikir kedepan dengan membuat sesuatu yang alami apa yang menjadi daya tarik kampung itu serta mempunyai hak dasar dalam meningkatkan kualitas hidup. Kampung kb ini bukan hanya sekedar menjadi symbol pembinaan keluarga berencana namun bisa memunculkan inovasi –inovasi masyarakat yang dapat mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan serta perubahan mindset masyarakat yang dulu berkehidupan kumuh sekarang bertata indah. Dalam Peraturan BupatiGowa No 56 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga bahwa, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di pimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada bupati mulai sektertaris daerah Kerjasama antar lembaga

Adapun hal yang mendasari adalah kurangnya kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana yang ada di Kabupaten Gowa dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana yang mengakibatkan angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang sehingga kesejahteraan warga masyarakat rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana Di KabupatenGowa.”

Kerjasama adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. Kerjasama antar lembaga merupakan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah dan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang dilakukan, maka tuntutan melakukan kerjasama dengan pihak lain mutlak dilakukan demi terwujudnya peningkatan kinerja organisasi. Di dasari keinginan untuk mensistematisasikan segala proses kerjasama yang dilakukan serta memudahkan dalam koordinasi dan dokumentasi antara unit kerja yang ada maka disusunlah peraturan tentang pedoman kerjasama antar lembaga. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga harus didasarkan atas prinsip-prinsip kemanfaatan diantara pihak-pihak yang bekerjasama serta mengutamakan keterbukaan dalam penyelenggaraannya. Kerjasama menurut SoerjonoSoekanto (2007) adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama kerjsama timbul karena adanya kesamaan tujuana kan dicapai.

Kelembagaan merupakan suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, di wadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etika aturan formal dan non formal untuk bekerjasama demi mencapaitujuan yang diinginkan. Kelembagaankhususnya di bidang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan sebagai berikut yakni Bagaimana Kerjasama Antara Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan oleh peneliti maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di kabupaten Gowa.?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah khazanah keilmuan pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya menyangkut persoalan Kerjasama antar kelembagaan dalam sebuah kebijakan serta sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan Dinas terkait dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga yang berkepentingan dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan suatu kebijakan lebih baik lagi dan meningkatkan kinerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Merita Rahma (2016) dengan judul "Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pelaksanaan Program KB Dinamis / Tim KB Keliling (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis /TKBK Di kabupaten Pringsewu) "

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program KB Dinamis / TKBK sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih di temukan sedikit kendala serta masalah dalam pelaksanaannya . Dengan menggunakan pendekatan Van Meter dan Van horn , maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program KB Dinamis / TKBK Di Kabupaten Pringsuwe sudah berjalan dengan sebagaimana yang telah di terapkan , walaupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan.

2. Penelitian dari Yenny Wahyuni (2015) dengan judul " Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo , Kecamatan Purwodadi , Kabupaten Puworejo ,Jawa Tengah) "

hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Sidoharjo yang tidak mengikuti program keluarga berencana (43,2%) tidak setuju adanya program keluarga berencana , karena program keluarga berencana merupakan program yang bersifat memaksa . hal tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat . Akan tetapi masyarakat lain (17,9%)

mengungkapkan bahwa keluarga berencana merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera, sedangkan (38,97%) mengatakan bahwa keluarga sejahtera dapat di peroleh dengan adanya kesadaran hak dan tanggung jawab masing –masing suami istri. Dengan demikian dasar dari adanya bertanggung jawab atas tugasnya, kedua letak pada kesadaran besar suami isteri juga tingkat perekonomian yang harus lebih memandai.

3. Penelitian dari Harry Gunawan (2013) dengan judul “Strategis Humas BKKBN Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana Dii Provinsi Riau”

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Humas BBKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana tidak bekerja dengan sendirinya, humas memerlukan peran komunikator baik dari pihak internal maupun eksternal agar mempermudah dalam proses mensosialisasikan program berencana di Provinsi Riau, selain itu humas juga bekerjasama dengan pihak media massa, baik media cetak maupun media elektronik agar sosialisasi program keluarga Berencana tersebar secara merata ke seluruh masyarakat Provinsi Riau.

B. Konsep Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya adalah dengan cara bekerjasama. Bowo dan Andi (2007), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila di peroleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat

bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Moh Jafar Hafsah (2001), menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu Tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dalam perspektif *Good Governance*, kemitraan merupakan ciri utama dari model baru tata pemerintahan local (*a new model of local governance*) yang mencakup penciptaan dan pencerminan perubahan hubungan yang melibatkan tiga komponen, yaitu, Negara, pasar dan masyarakat sipil (Southern, 2002). Dalam situasi dimana pemerintah (Negara) mengalami kesulitan finansial, kombinasi tiga komponen atau *multistakeholders* tersebut dapat menciptakan perpaduan keterampilan sumberdaya. Hal ini tidak saja penting, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pemberian dan kualitas layanan dengan cara-cara yang efektif dan efisien (Slater, 2001).

Game theory adalah teori yang menjelaskan problem pengembilan keputusan yang melibatkan beberapa kelompok kepentingan (*multi stakeholders*). Teori ini mempelajari interaksi strategis antar pemain (agen). Dalam permainan strategis, suatu agen memilih strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan, berdasarkan strategi yang dipilih agen lain. Ada dua bentuk permainan yaitu permainan zero-sum (*zero-sum game*) atau non kooperatif yaitu keadaan dimana pemenang memperoleh semuanya, dan permainan non zero sum (*non zero sum game*) atau permainan kooperatif

dimana memungkinkan terjadinya koalisi antara sesama pemain intinya, teori permainan dapat menjelaskan suatu paradox yang cukup terkenal, yakni bagaimana orang bisa bekerjasama dalam masyarakat apabila masing-masing dari mereka cenderung berusaha menjadi pemenang. menunjukkan perbedaan antara permainan kooperatif, dimana masing masing pemain saling bekerjasama secara terikat dan permainan nonkooperatif, dimana tidak ada kekuatan dari luar permainan yang dapat memaksakan berlakunya sekumpulan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam teori permainan, setiap pemain berusaha untuk mencapai suatu kesetimbangan (*equilibrium*) yang disebut sebagai kesetimbangan nash.

Pembangunan wilayah, penerapan teori permainan ini dapat juga dilakukan, apabila akan membangun suatu wilayah, pilihannya adalah apakah antara pemerintah daerah wilayah tersebut harus saling bersaing. Apabila pemicu kerjasama telah terbentuk, kondisi kestimbangan akan dapat terwujud apabila diantara mereka melakukan kerjasama sebagai ilustrasi jika beberapa daerah otonom memiliki keterbatasan sumberdaya ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), dan mereka ingin mengembangkan ekonomi wilayahnya, maka jika mereka menerapkan permainan non kooperatif justru akan saling melemahkan namun jika mereka mau menerapkan permainan kooperatif atau mau saling bekerjasama maka keuntungan akan di peroleh seperti efisien biaya dalam mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi masing-masing daerah.

Menurut West (2002) telah banyak riset yang membuktikan bahwa kerjasama secara berkelompok mengarah pada efisien dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan .

Sealain keunggulan diatas, kerjasama juga dapat menstimulasi seseorang berkontribusi dalam kelompoknya, sebagaimana yang di nyatakan Davis (dalam Dewi,2006) kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan. Kontribusi tiap tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang interigasi. Individu dikatakan bekerjasama jika upaya-upayadari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama semakin besar integrasinya semakin besar tingkat kerjasamanya.

Tangkisan (2005) dalam manajemen public ,memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang di perkirakan mungkin akan timbul kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban , dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. menurut Robet L. clistrap dalam Roesti (2008) menyatakan “ kerjasama merupakansuatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secura bersama-sama “ dalam kerajsama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama

Adapun manfaat kerjasama menurut Koesnadi (2003) yaitu dapat mendorong kerjasama memiliki banyak manfaat yang bias di dapatkan oleh kedua belah pihak yang adanya persaingan yang bias mencapai tujuannya yaitu meningkatkan produktifitas selain itu dengan bekerjasama dapat meningkatkan semangat kerja individu sehingga tenaga kerja akan lebih efektif, produktif dan efisien.

1. kerjasama juga dapat mendorong terciptanya sebuah sinergi sehingga biaya operasional yang di butuhkan akan lebih rendah dan persaingan akan semakin meningkat, kerjasama juga dapat memberikan dorongan hubungan antara dua pihak menjadi lebih erat dan harmonis dan penuh setiakawan.
2. Semangat kerja yang tinggi juga bias muncul karena adanya kerjasama bagi lingkungan kerjasama akan memberikan dampak yang positif dimana semua orang akan secara otomatis ikut menjaga dan juga melestarikan situasi dan kondisi sehingga akan lebih baik.
3. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana mereka akan saling menguntungkan dan kedua pihak akan ikut perang aktif berkontribusi sesuai dengan pontesi yang di miliki oleh masing-masing sehingga keuntungan akan menjadi keuntungan bersama dalam mencapai tujuan tertentu.

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka di butuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang di jelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip

good governance antara lain : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, consensus dan saling menguntungkan dan memajukan.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007) bahwa bentuk perjanjian (forms of agreement) dibedakan atas:

1. Handshake agreements, yaitu pengantun kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis
2. Written agreements, yaitu pengaturann kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis. sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu :
 - a. *Consortia* , yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya karna lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
 - b. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karna skala pembelian lebih besar .
 - c. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal , atau yang tidak setiap hari digunakan .
 - d. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
 - e. *Joint services* , yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
 - f. *Contract services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.

g. Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya. (Baron & Byene, 2000) Secara teoritis, kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur 2 pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi tidak ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang serasi dan selaras. Semenjak era desentralisasi, daerah berupaya melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing serta berusaha untuk menjaga kestabilan ekonominya. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dalam instansi setiap daerah dalam memelihara

sumber daya alamnya agar tetap terjaga dan bisa menjadi omset perekonomian yang bagus jika dikelola dengan baik.

Johson (2010) menyatakan bahwa kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri serta membangun persetujuan bersama. Samani dan Hariyanto (2010) mengungkapkan bahwa sikap kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau berkerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang menguntungkan semua pihak tersebut terciptap karna adanya kepedulian dan rasa percaya antar satu pihak dengan pihak lain. Menurut pendapat Johson dan Samani maka dapat di simpulkan bahwa usaha kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang di pecahkan berkaitan dengan tujuan kelompok yang hendak di capai.

Sugiono, Widayanti dkk (2016) ada di dalam gaya kepemimpinan menurut teori kempinan sifat (*trait*) sebagai berikut:

1. Kematangan emosional yaitu kemampuan menerima hal-hal negatif dari lingkungan tanpa membelas dengan sikap yang negative pula melainkan dengan kebijakan.
2. Intergratis yaitu kejujuran dn kemuan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar kata-kata.
3. Kepercayaan diri yaitu yang membuat orang lain merasa percaya diri, biasanya muncul melalui berbagai bentuk manajemen impresi yang di tujukan kepada karyawan.

4. Toleransi stress yaitu kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi stress tanpa mengakibatkan gangguan yang berarti sangat penting untuk pemimpin didalam hubungan dengan karyawan.
5. Keramahan yaitu kecenderungan untuk menerima, menyesuaikan diri, bisa dipercaya dan mengasuh.

Robbins dkk (2016) factor –faktor yang mempengaruhi kerjasama tim sebagai berikut:

1. Sasaran yang jelas yaitu pemahaman yang mengenai sasaran yang akan dicapai sangat di perlukan agar anggota tahu apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai tujuan dan memahami cara mereka bekerjasama untuk mencapai sasaran.
2. Keterampilan Relevan yaitu tim yang efektif terdiri dari individu –individu yang kompeten memiliki keterampilan teknis dan keterampilan pribadi.
3. Saling percaya yaitu factor kerjasama tim bercirikan kepercayaan timbal balik yang tinggi dikalangan anggota, dengan saling percaya antar individu dalam tim akan memudahkan kelompok dlam bekerja.
4. Komitmen bersama yaitu bercirikan pada dedikasi bersama pada tujuan tim dan kemauan untuk menghabiskan sejumlah tenaga untuk mencapainya.
5. Komunikasi yaitu komunikasi yang baik secara verbal atau nonverbal dengan satu sama lain dalam bentuk yang mudah dan dimengerti .komunikasi yang baik akan menimbulkan jalinan kerja yang baik.

Adapun indikator-indikator kerjasama tim menurut Manurung (2013) adalah:

1. Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim agar lebih efektif daripada kerja secara individual. Yang akan di capai sangat di perlukan agar anggota tahu apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai dan memahami cara mereka bekerjasama.
2. Kepercayaan yang disebut *trust* adalah keyakinan bahwa seseorang sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya atau bentuk yang mudah dimengerti yang menimbulkan jalinan kerja yang baik
3. Kekompakan adalah bekerjasama bersatu padu, teratur dan rapi dalam menghadapi suatu pekerjaan yang di tandai adanya saling tergantung satu sama lain.

Penjelasan mengenai pengertian kerjasama tadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dilatarbelakangi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang terkadang perlu saling membantu guna memperoleh sebuah tujuan bersama contoh kerjasama dengan mudah dilihat pada kehidupan sehari-hari, dari tingkat terkecil, yakni keluarga, hingga tingkat terbesar seperti negara.

C. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hokum dan politik, organisasi dan manajemen. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan ada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada

aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrument dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003).

Djogo dkk (2003) juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep perilaku social yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang.

Ada beberapa definisi lembaga social menurut parah ahli dalam buku (Mudiyono, 2005)

1. Paul Horton dan Chester L.Hunt, Lembaga sosial adalah sistem norma – norma sosial dan hubungan hubungan yang menyatukan nilai – nilai dan prosedur – prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Peter L. Berger, Lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat.
3. Mayor Polak, Lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai – nilai penting.
4. W. Hamilton, Lembaga sosial adalah tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi.

5. Robert Maclver dan C.H. Page, Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.
 6. Leopold Von Wiese dan Becker, Lembaga sosial adalah jaringan proses antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola – polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya.
 7. Koentjaraningrat, Lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia
 8. Soerjono Soekanto, Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat
- Fungsi dari lembaga social/kemasyarakatan khususnya dalam pembangunan pertanian berfungsi untuk menunjang program pembangunan di pedesaan (Yuliati dan purnomo, 2003) fungsinya antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi masyarakat, bagaimana ia harus berbuat didalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap prilaku anggotanya.

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan (Yuliati dan Purnomo, 2003) :

1. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *Basic institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
4. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
5. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional and regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan,

sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

Setiap orang memiliki perilaku yang berbeda, sehingga aturan yang ditetapkan pada lembaga kemasyarakatan akan berbeda-beda pula.

Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non fisik. Sehingga bisa dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang dikarenakan oleh adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya.

Daymon dan Immy (2008) teori kelembangan (institutional theory) menyatakan bahwa organisasi yang menghadapi tuntutan-tuntanan yang saling berlawanan dapat mengadopsi praktik dan struktur yang mengalihkan perhatian stakeholder dari hal yang mereka anggap tidak dapat diterima (unacceptable) hal ini memberikan kesan legitimate, teori kelembangan memberikan pandangan yang tidak utuh teori tersebut tidak memperhitungkan taktik-taktik pengelolaan kesan yang digunakan oleh organisasi perpaduan antara teori kelembangan dengan pengelolaan mungkin dapat membantu memahami bagaimana organisasi melidungi legitimasi.

Anantanyu (2011) kelembangan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi dan aktivitas yang berpusat disekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, agama dan Negara dalam mendapatkan pakaian, makanan dan kenikmatan serta perlindungan suatu lembaga dibentuk selalu

bertujuan untuk memnuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi , lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan dengan struktur artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi social untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Nugroho (2010) kelembangaan diartikan sebagai aturan main, norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku seseorang, baik secara individu, masyarakat dan organisasi ,definisi tersebut mengimplikasikan dua komponen penting dalam suatu kelembangaan yaitu aturan main dan organisasi dimana kedua komponen tersebut sulit dipisahkan karna pada faktanya suatu organisasi dapat berjalan apabila aturan main yang mengizinkan dan memungkinkan.

Surbakti (2010) kelembangaan mengatakan partai dibentuk oleh kalangan legislative dan eksekutif karna ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan suatu kontak dengan masyarakat secara langsung , partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi dan muncul partai politik lain yang terbntuk oleh kalangan masyarakat partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil dalam masyarakat yang sadar akan adanya politik berdasarkan penilaiannya hal ini tentu saj tidak hanya dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai memobilisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Menurut Hanafie (2010) lembaga adalah badan organisasi kaidah dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan, bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder, unsure-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintahan, kekayaan, industri pendidikan agama dan keluarga.

Menurut Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normative dan regulative yang sarat dengan perubahan. elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti rules, norms, cultural benefit, peran dan sumber daya material hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Kelembagaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal menurut Sitti Bulkis (2011) kelembagaan local dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu sector public

(Administrasi local dan pemerintah local) , kategori sector sukarela (organisasi keanggotaan koperasi) , kategori sector swasta (organisasi jasa dan bisnis). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line organization , military organization) lembaga garis dan staf (line and staff organization) lembaga fungsi (functional organization) jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu system social yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai , norma dan aturan yang mengikutinya serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

D. Konsep Keluarga Berencana

Keluarga berencan merupakan usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. keluarga berencana yaitu membatasi jumlah anak dimana dalam suatu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua anak atau tiga anak saja. keluarga berencana yang diperbolehkan suatu usaha pengaturan atau kelahiran usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karna situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga masyarakat dan Negara, perencanaan keluarga merujuk pada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan , kemasyarakatan dan ekonomi untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak.
2. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.
3. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan melainkan juga untuk kemampuan fisik, financial, pendidikan dan pemeliharaan anak.

Menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu pokok dalam program keluarga berencana adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. cara yang digunakan untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi Wiknjastro(2005).

macam-macam metode kontrasepsi adalah intra uterine devices (IUD), implan, suntik, kondom, metode operatif untuk pria (*vasektomi*), dan kontrasepsi pil. Saifudin (2003) kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan program kb mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk yang akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan yang cukup berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Herlianto(2008) cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi yaitu ibu mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap akurat dan benar untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang

rasional , efektif dan efisien . KB merupakan program yang berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama (*post poning*) menjarangkan anak (*spacing*) atau membatasi (*limiting*) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kembalinya fase kesuburan (*ferundity*)Sheilla(2002).

Menurut Hartanto (2002) ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan memilih kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah kontrasepsi yang memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Aman tau tidak berbahaya
- b. Dapat di andalkan
- c. Sederhana
- d. Murah
- e. Dapat diterima
- f. Pemakaian jangka lama (*continuation rate tinggi*).

Menurut Baziad (2008) kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang di suntikan kedalam tubuh dalam jangka waktu tertentu kemudian masuk kedalam pembuluh darah diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna untuk mencegah kemungkinan timbulnya kehamilan. Kontrasepsi suntikan merupakan suatu tindakan invasif karena menembus pelindung kulit, penyutikan harus dilakukan hati-hati dengan teknik aseptik untuk mencegah infeksi. salah satu tujuan utama dari kontrasepsi yang berdaya kerja panjang membutuhkan pemakaian setiap hari.

Jenis-jenis KB suntik yang sering digunakan di Indonesia antara lain (Prawirohardjo 2007):

- a. Suntikan/1 bulan (golongan *progestin* dengan campuran *estrogen propianat*), *cyclo provera* mengandung 25 mg *medroxy progesterone acetat* dan 5mg *estradiol cypionet*.
- b. Suntikan/3 bulan (kontrasepsi yang hanya mengandung *progestin*) *depo medroksi progesterone asetat* (DMPA) mengandung 150mg dan *depo noretisteron enantat* (*depo noristerat*) mengandung 200mg.

Penyuluhan kesehatan merupakan aspek penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi karena selain membantu klien untuk memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya juga membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama sehingga klien lebih puas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program KB. Penyuluhan kesehatan tidak hanya memberikan suatu informasi namun juga memberikan keahlian dan kepercayaan diri yang berguna untuk meningkatkan kesehatan Efendy (2003).

Kesadaran karena adanya informasi tentang berbagai macam alat kontrasepsi dengan kelebihanannya masing-masing maka ibu-ibu akan termotivasi bias berasal dari dalam diri maupun luar Moekijat (2002). Badan dari pemerintah yang mengurus program keluarga berencana adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana .
4. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Adapun alat kontrasepsi menurut BKKBN yaitu:

1. Kondom adalah salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri (tegang) sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS.
2. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegah kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa post-partum bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui,

maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak (atau selama masih menyusui) dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain.

3. AKDR atau IUD (Intra Uterine Device) bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu (ASI).
4. Kontrasepsi implant Disebut alat kontrasepsi bawah kulit, karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas, alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon sedikit demi sedikit. Jadi, konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang diganti setiap tahun.
5. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi vasa

deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.

6. Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi bisa dilakukan juga pada pria, yaitu vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali, karena kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Dengan demikian, sterilisasi tidak boleh dilakukan kepada wanita yang belum/tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu menerima sterilisasi. Yang harus dijadikan patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri. Misalnya, untuk usia istri 25–30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau lebih.
7. Diafragma adalah Alat kontrasepsi ini berbentuk kubah dan terbuat dari karet atau silikon. Setengah bagian kubah tersebut diisi krim atau spermisida untuk membunuh sel sperma agar tidak masuk ke vagina. Setelah itu, alat ini dimasukkan ke dalam vagina dan diletakkan di atas serviks sebelum berhubungan intim.
8. Spermisida Dari sekian banyak alat kontrasepsi, hanya sedikit atau sekitar 0,6% responden menggunakan alat KB spermisida. Alat ini mengandung

bahan kimia nonoxynol-9 yang dapat membunuh sperma atau menghambat pergerakannya. Spermisida biasanya diletakkan di dalam vagina dekat leher rahim dan harus segera dimasukkan sebelum berhubungan intim. Efek alat KB ini umumnya mulai bekerja setidaknya 15 menit setelah digunakan.

9. Pil kombinasi merupakan kontrasepsi oral, yang mengandung hormon progesterin dan estrogen. Pil kombinasi mencegah kehamilan dengan cara menghambat indung telur atau ovarium, untuk melepaskan sel telur. Selain itu, pil ini juga menebalkan lendir serviks, sehingga menghambat pembuahan dari sel sperma. Berkonsultasilah dengan dokter, untuk mendapatkan pil kombinasi hormon ini. Sebelum pemberian resep, dokter akan melakukan pengecekan tekanan darah, serta mengkaji riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi.
10. Kb suntik adalah Pilihan lain untuk alat kontrasepsi wanita, yakni suntik progesterin. Suntik progesterin, yang juga membantu menghambat pembuahan dan penebalan lendir serviks, memiliki efektivitas sebesar 99% dalam mencegah kehamilan. Untuk hasil yang optimal, Anda bisa melakukan suntik progesterin sekali 3 bulan
11. Tak hanya pria, wanita juga memiliki kondom yang dapat menghambat pembuahan sel telur untuk pencegahan kehamilan. Kondom wanita berbentuk kantong lembut yang memiliki cincin di kedua ujungnya. Cincin yang tertutup ditempatkan di dalam vagina dan yang terbuka berada di luar vagina. Penggunaan kondom wanita mirip dengan pemakaian tampon.

Jika belum terbiasa Anda bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai penggunaan kondom ini.

E. Kerangka Pikir

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya adalah dengan cara bekerjasama. Kerjasama antara kelembagaan dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Gowa merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan program nasional keluarga berencana. Untuk melihat kerjasama antar lembaga tersebut dapat di ukur dengan indikator yaitu kerjasama, kepercayaan dan kekompakan. (Manurung 2013).

Adapun hal ini yang mendasar ialah kurangnya kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana yang ada di Kabupaten Gowa dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana yang mengakibatkan angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang sehingga kesejahteraan masyarakat rendah. Sehingga kerjasama antar lembaga yang terkait dalam penanganan masalah ini sangat diharapkan agar mencapai tujuan, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi alam dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas adalah untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga terutama yang diselenggarakan oleh industri masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan sehingga membudidaya dan melembaganya keluarga kecil berkualitas.

.Kerjasama antara lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Gowa merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan program nasional keluarga berencana. Untuk melihat kerjasama antar lembaga tersebut dapat di ukur dengan indikator yaitu kerjasama, kepercayaan dan kekompakan.(Manurung 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut.



Gambar 1.2 : Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dimulai dari rumusan masalah yang selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori-teori dan tinjauan pustaka. Adapun yang menjadi fokus penelitian ialah indikator yang terkandung dalam kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Gowa sehingga tujuan dan keberhasilan yang diinginkan dalam kerjasama kelembagaan dalam kebijakan ini dapat tercapai dengan baik.

G. Deskripsi Fokus

Adapun Teori Kerjasama sehingga tercapainya tujuan dan keberhasilan menurut Manurung 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah merupakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tapi dikerjakan secara bersama oleh dua orang atau lebih, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan oleh sebuah tim agar lebih efektif daripada kerja secara individual. Yang akan di capai sangat di perlukan agar anggota tahu apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai dan memahami cara mereka bekerjasama dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kab. Gowa.
2. Kepercayaan adalah merupakan aspek yang paling utama dan paling penting untuk membangun sebuah komitmen serta sebuah janji realisasikan jika kedepannya berarti, bahwa seseorang sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan dilakukan yang

mudah dimengerti yang menimbulkan kerja yang baik dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kab. Gowa.

3. Kekompakan adalah kerjasama bersatu padu, teratur, dan rapi dalam menghadapi suatu pekerjaan yang ditandai adanya saling ketergantungan satu sama lain, saling memahami, introspeksi diri dan menjauhkan diri dari sikap egois dalam mencapai suatu tujuan terhadap pelaksanaan keluarga berencana di Kab. Gowa



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dua bulan setelah proposal. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Dan Dinas kesehatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui kesejah teraan masyarakat dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program keluarga berencana yang ada di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah untuk menjabarkan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan kejadian empiric dibalik fenomena yang ada secara mendalam , rinci dan tuntas (sugiyono, 2014) penelitian berusaha menjelaskan sedetail mungkin untuk kerjasama antara lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana metode kualitatif juga disebut aristik yaitu proses bersifatseni.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus dimana yang dimaksudkan ialah untuk membergambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun

masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di KabupatenGowa.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan keluarga berencana.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpul kan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di KabupatenGowa.

D. Informan Penelitian

Penentuan (informan) di dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang di pandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Gowa.Untuk memilih informan dalam penelitian, peneliti mendapatkannya dengan menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti. Pemilihan informan yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh data informasi penelitian (purposive sampling) yang tujuannya untuk mengambil sampel secara subjektif dengan anggapan bahwa sampel yang dipilih merupakan keterwakilan (refresentatif) bagi peneliti, sehingga data yang dikumpulkan akan didapat langsung pada sumbernya yang dapat dilakukan secara profesional demi

keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yakni:

Tabel: 1:3
Informan penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Sofyan, D.S.Sos.MM	SO	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Orang
2	Kamalia	KA	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Orang
3	Ikhsan, S.Sos	IK	Kepala Sub bagian Umpeg	1 Orang
4	Dra.Hj.Ida Rosalina, M.Kes	IR	Kepala Posyandu Desa Bonto Marannu	1 Orang
Jumlah				4 Orang

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

E. Teknik Pengumpulan data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak di peroleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi di lakukan ketika di lakukan pengamatan langsung di kantor Badan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan mengenai kerjasama Antara Lembaga Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana di Kab. Gowa menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana diperoleh dari dokumen dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai kerjasama Antara Lembaga Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana di Kab. Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan temuan hasil penelitian hal ini di sebabkan, data akan menuntun kita kearah temuan ilmiah, bila di analisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dari hasil penelitian menjadi data, di mana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dan Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengantur data sedemikian rupa mengenai hasil penelitian terkait kerjasama Antara Lembaga Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana di Kab. Gowa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih muda dipahami dari hasil penelitian terkait kerjasama Antara Lembaga Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana di Kab. Gowa.

3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan sebab akibat, dan berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan mengenai hasil penelitian terkait kerjasama Antara Lembaga Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana di Kab. Gowa dapat di pertanggung jawabkan .

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada .Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumen .Apabila

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

1. Keadaan Geografis, Topografi, dan Demografis Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773o Bujur Barat dan 120, Timur serta 5,0829342862o Lintang Utara dan 5,5773054370 Lintang Selatan; dimana wilayahnya terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setaradengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggi moncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setaradengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannudan Pattallassang. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa pada tahun 2013 terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa dan 45 kelurahan yang berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota sebagai berikut:

Sebelah utara Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros—Sebelah Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.—Sebelah selatan Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto,—Sebelah barat Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Secara umum Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan temperatur 27,125°celciusdimana dapat ditemui daerah beriklim basah dan kering, dengan ketinggian 5 –1300 meter diatas permukaan laut.Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2013tercatat sebanyak 670.465jiwa yang terdiri dari 329.673jiwa atau 49,17% penduduk laki-laki, dan 340.792jiwa atau 50,83% penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 97, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,71%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 60,29% dan penduduk usia lanjut terdapat 7,99% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,68% pertahun.

2. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan, dengan wilayah terluas kecamatan Tombolo Pao. Dari kecamatan-kecamatan tersebut terbagi dalam 121 desa dan 46 kelurahan.

3.Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatannasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi dapat juga berarti kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.Salah

satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB dapat dihitung menurut harga yang berlaku yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun di mana PDB dihitung dan menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar (base year) perbandingan. PDB untuk tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu yang dihasilkan oleh seluruh 6 unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga constant menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar PDRB Kabupaten Gowa atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2012 sebesar Rp. 6.791.070,31 Juta, meningkat lebih dari 14 persen dibandingkan tahun 2011. Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 sebesar Rp. 2.153.398,63 Juta atau meningkat 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas harga berlaku yang cukup tinggi memiliki korelasi positif dengan inflasi yang cukup besar pada tahun tersebut, yaitu 6,59 persen untuk kelompok pengeluaran bahan makanan, dan 7,77 persen untuk kelompok pengeluaran sandang. Meskipun pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun tersebut, namun harga-harga sebagian besar bahan pokok telah telanjur melambung. Harga padi naik lebih dari 15 persen, harga ketela pohon naik lebih dari dua kali lipat. Begitu pula

harga tanaman palawija lainnya. Namun demikian, perkembangan PDRB di tahun 2012 ini lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 16,71 persen.

Perekonomian suatu daerah dalam tahun tertentu dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Bisa juga dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan apabila terjadi peningkatan pada nilai PDRB, khususnya PDRB atas dasar harga konstan. Mengapa harga konstan, karena penghitungan PDRB atas dasar harga konstan meniadakan faktor inflasi, sehingga dapat dilihat dari peningkatan produksi suatu komoditi/jasa. Dilihat dari harga konstan, PDRB tahun 2017 meningkat sebesar 7,28 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2017 sebesar 7,28 persen, naik cukup besar dibandingkan 6,20 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, yaitu 18,65 persen, dimana pertumbuhan tahun sebelumnya 'hanya' 15 persen. Sub sektor Bank tumbuh hampir 24 persen, Lembaga Keuangan Non Bank 11,11 persen, Persewaan Bangunan 16,2 persen, serta Jasa Perusahaan 9,31 persen. Beberapa tahun terakhir ini memang semakin banyak bank yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor kas di Sungguminasa. Demikian halnya dengan bank syariah, seperti Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Begitu pula dengan lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan, tidak hanya ada di ibu kota kabupaten, tapi sudah merambah hingga ke Kecamatan.

Pallangga dan Bajeng. Tingginya animo masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, barangelektronik, dan perlengkapan rumah tangga lainnya membuat jumlah nasabah lembaga-lembaga pembiayaan seperti Adira, FIF dan lainnya kian banyak. Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam yang memiliki jiwa dan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan dilandasi pada ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang Sufi penyebar agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka. Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh Syekh Yusuf Tuanta Salamaka, dimana keduanya diangkat oleh Negara sebagai Pahlawan Nasional, telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kesehatan

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Poliklinik dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.

5. Pemerintahan

Aparat pemerintah dirasakan cukup profesional, terutama dalam mengatasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Dalam era reformasi diharapkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak terdapat di

Kabupaten Gowa. Sikap aparat yang dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani perlu diubah. Dengan demikian upaya perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral.

Struktur Organisasi

B. Sekretariat Daerah

1. Sekretariat

Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang-undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah
- f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi dan Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya
- e. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

3..Dinas-dinas Daerah

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri atas:

- a.Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda.

- b.Dinas Kesehatan.

- c.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- d.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- e.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- f.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- g.Dinas Pekerjaan Umum.

- h.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- i.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- j.Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- k.Dinas Pertanian.

- l.Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

- m.Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- n.Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- o.Dinas Pertambangan dan Energi.

Tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan di kabupaten Gowa dan fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

Tugas pokok dan fungsi BBKBN di Ragional Makassar melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan fungsi yaitu

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana
2. Penetapan norma, standar, prosudur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan Keluarga Berencana
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
6. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
7. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN dan Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Letak Geografis dan Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa.

Sesuai amanat Undang –undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan berdasarkan Undang –undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/Kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan memberdayakan peran serta masyarakat. Sistem pelayanan di bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera yang menjadi acuan bagi pelaksana tugas dan fungsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa peraturan daerah kabupaten gowa Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat

Daerah (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2016 Nomor 11) sesuai bagan terlampir dan berdasarkan surat keputusan bupati gowa nomor 56 tahun 2016 tentang tugas pokok ,fungsi dan rincian tugas jabatan structural pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa. kantor BKKBN Kab.Gowa tepatnya berada di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.49, Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

1. Visi dan Misi

a. Visi

dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah dan statistic, maka dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang di dalam RPJMD kabupaten gowa tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang di rumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa adalah: **“Lembaga Handal Dalam Mewujudkan penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga berkualitas dengan tata kerja pemerintahan yang baik”**

Penjelasan visi:

Menjadi lembaga dan aparat yang professional dan kredibel mempunyai makna bahwa organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa di harapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat yang professional yaitu mempunyai knwoledge ,skill, dan Ethic yang menandai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang efektif , efesien , kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kerja pemerintahan yang baik (good governance) mempunyai makna bahwa dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa berperan aktif dalam mewujudkan tata kekola pemerintahan kabupaten gowa yang baik sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu transparans, akuntabel,efesien, efektif , bertanggungjawab, memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terkait .Dengan visi sebagai **“Lembaga Handal Dalam Mewujudkan penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga berkualitas dengan tata kerja pemerintahan yang baik”** diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang di tandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan net Reproductive Rate (NNR) sebesar 1.0.

b. Misi

Pernyataan visi yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya di terjemahkan kedalam guidelines yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat di jadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kabupaten gowa dalam bentuk pernyataan misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan/diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. pernyataan misi menunjukan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkat instensitas kegiatan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen di daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan kabupaten Gowa dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai serta menjelaskan keberadaan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gowa, program kegiatan apa yang harus dilakukan keluarga dan bagaimana cara melakukannya. Adapun misi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gowa sebagai

berikut :Penjelasan misi 1: mengandung makna bahwa lembaga dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gowa berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan yang lebih menekankan pada upaya pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.Misi 2: mengandung makna bahwa dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gowa berperan aktif dalam memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas di kabupaten Gowa.

Misi 3: mengandung makna bahwa dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan memfasilitasi pembangunan keluarga dan peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi melalui kesertaan masyarakat dalam PIK Remaja dan Mahasiswa kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) Sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga . Selain itu dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berupaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan kegiatan bina keluarga balita (BKB) Bina keluarga Remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL) sebagai wadah untuk mendidik keluarga yang memiliki Balita , Remaja dan Lansia agar dapat bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran tersebut.

Misi 4: mengandung makna bahwa dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gowa berperan dalam mengembangkan

jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dn pembangunan keluarga (KKBPK) melalui LSOM, SKPD kemitraan sehingga program KKBPK dapat terwujud.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Dan Seks Ratio

N0	KECEMATAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	RATIO
1	BONTONOMPO	20991	21735	105
2	BAJENG	33075	32945	105
3	TOMPOBULU	15573	15830	108
4	TINGGIMONCONG	11298	11324	107
5	PARANGLOE	8937	9194	105
6	BONTMARANNU	16825	17069	108
7	PALNGGA	67617	69892	110
8	SOMBOPOU	58989	54677	108
9	BUNGYA	9134	9371	110
10	TONBOLOPAO	13183	14741	108
11	BIRINGBULU	17988	17921	107
12	BAROMBONG B	24045	20218	107
13	PATALLASANG	12849	12989	105
14	MANUJU	7508	7571	106
15	BONTOLEMPANGAN	8846	9311	107
16	BONTONOMPO SEL	16071	16224	105
17	PARIGI	6456	6900	106
18	BAJENG BARAT	12520	12456	108

Sumber : Kantor BKKBN Kab.Gowa Dalam angka 2019

Tabel diatas menunjukan penduduk dan seks Ratio pada tahun 2019 dapat di artikan bagaimana kecamatan Bontonompo (20991) , kecamatan Bajeng Barat (1250) , Seks Ratio (105) dan (108).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	JUMLAH		JUMLAH YG DATANG		JUMLAH YG MENINGGA		JUMLAH YG PINDAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	0-4 TAHUN	22562	20548	402	253	85	48	137	106
2	5-9 TAHUN	29406	26837	158	172	14	8	180	188
3	10-14 TAHUN	31223	28354	152	151	14	19	150	146
4	15-19 TAHUN	32575	29949	174	189	38	20	159	201
5	20-24 TAHUN	29443	26705	398	375	32	25	327	305
6	25-29 TAHUN	27329	25475	440	369	22	36	435	416

7	30-34 TAHU N	25549	25357	306	231	38	42	342	290
8	35-39 TAHU N	26591	26582	251	208	44	49	248	216
9	40-44 TAHU N	25643	25217	146	139	71	59	167	148
10	45-49 TAHU N	25094	24141	132	122	110	83	126	130
11	50-54 TAHU N	20556	20018	82	45	151	150	91	94
12	55-59 TAHU N	16869	16579	41	52	170	165	55	56
13	60-64 TAHU N	11908	11171	32	35	230	202	51	40
14	65-69 TAHU N	8664	8511	18	25	221	211	42	22
15	70-74 TAHU N	5535	5816	8	9	193	203	17	14
16	75	5281	6148	9	8	233	298	30	18
JUMLAH		344222	32744	274	238	1666	1618	255	239
		8	4	9	3			7	0

Sumber : Kantor BKKBN Kab.Gowa Dalam angka 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kelompok umur tahun 2019 dapat diartikan tentang bagaimana umur Laki-laki dan Perempuan jumlah yang datang, jumlah yang meninggal dan jumlah yang pindah sebagai berikut:

Jumlah Laki-laki dan perempuan : 2749 dan 2383

Jumlah yang datang : 1660 dan 1618

Jumlah yang pindah : 2557 dan 2390

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan dimasa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat private goods yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi social sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin.

- a. Visi Dinas Kesehatan yaitu " GOWA MENUJU SEHAT ". Secara filosofis, visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dengan segala potensinya akan berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berperilaku sehat dengan

menerapkan konsep- konsep sehat pada semua tatanan baik perorangan, keluarga maupun kelompok-kelompok masyarakat secara konsisten, untuk mencapai hal tersebut maka harus dilakukan secara terus menerus.

b. Misi

Adapun Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa :

1. Menyiapkan Tenaga sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
2. Memelihara dan meningkatkan Pelayanan yang bermutu merata dan terjangkau
3. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat
4. Memelihara dan meningkatkan Kesehatan individu Keluarga dan Masyarakat beserta lingkungannya.

Kedudukan dan Latar Belakang ;

Dinas kesehatan Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan
3. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, sarana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut diaplikasikan dalam sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya, selain itu Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit serta sejumlah indikator lainnya.

Program Unggulan:

1. Pelayanan Kesehatan Gratis.
2. Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

B. Hasil Penelitian Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana Di Kabupaten Gowa

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya. (Baron & Byene,2000)Secara teoritis, kerjasama pada hakikatnya

mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur 2 pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi tidak ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang serasi dan selaras. Semenjak era desentralisasi, daerah berupaya melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing serta berusaha untuk menjaga kestabilan ekonominya. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dalam instansi setiap daerah dalam memelihara sumber daya alamnya agar tetap terjaga dan bisa menjadi omset perekonomian yang bagus jika dikelola dengan baik.

Adapun indikator-indikator kerjasama tim menurut Manurung (2013) adalah: (1) Kerjasama tim, (2) Kepercayaan, dan (3) Kekompakan. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kerjasama Tim

Kerjasama tim dilakukan oleh sebuah tim agar lebih efektif daripada kerja secara individual.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku

Kepala Sub Bagian Umpeg Dinas Kesehatan kabupaten gowa, mengatakan :

“Kita disini di dinas kesehatan bekerjasamanya seperti koordinasi khususnya dalam pelayanan karena kita kan punya bidan disini jadi setiap ada kegiatan penyuluhan KB rata-rata itu diambil disini kemudian kerjasamanya itu masing-masing punya tupoksi dan juga disini yang menangani KB itu seksi kesehatan ibu dan anak” (Hasil Wawancara IK Rabu 27 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Kerjasamadapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam penyuluhan KB setiap lembaga khususnya pegawai perlu adanya koordinasi dalam setiap pelayanan dan setiap kerjasama diselesaikan sesuai tupoksi yang ada. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa, mengatakan :

“Persoalan kompetensi peduli dalam bekerjasama itu beda kemampuan, ada yang sudah mampu dan ada yang masih belum bisa tapi selalu kita dorong dalam setiap kegiatan kemudian dibutuhkan tanggung jawab dalam kerjasama tim dan sepanjang ini tanggung jawab mereka sudah cukup membaik karena dalam menggarap KB ini juga dibutuhkan kerjasama timwork lagi dan lagi kubilang yang harus baik” (Hasil Wawancara SO Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kerjasama dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan kerjasama dalam kompetensi setiap individu berbeda karakter, ada yang sudah bisa karena pengalaman dan masih ada yang masih kurang pengalaman kegiatan penyuluhannya, disamping itu tanggung jawab tim sangat penting diperhatikan yang secara keseluruhan sudah cukup baik dalam menggarap kegiatan penyuluhan KB. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku sekretaris di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa, mengatakan :

"Kerjasamanya itu adalah bertukar informasi disetiap kegiatan yang berupa permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan, untuk kerjasama pasti juga ada kendala utamanya terjadi miskomunikasi diantara mereka kemudian persoalan karakter setiap individu yang berbeda jadi menyatukan banyak karakter itu memang sulit untuk kerjasama karena ada ego masing-masing." (Hasil Wawancara ibu KA Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kerjasama dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam kerjasama bertukar informasi dalam setiap kegiatan penyuluhan sangat penting dilakukan tetapi kendala yang sering dihadapi adalah miskomunikasi informasi setiap pegawai dalam kegiatan penyuluhan KB dandalam kerjasama menyatukan banyak karater itu juga sulit jadi perlu adanya pertukaran informasi agar setiap kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku kepala posyandu ,mengatakan :

"kerjasama antara lembaga itu disini bisa diliat dari awal kegiatan, kentaraji itu dek kalau memang dari awal baik dalam menggarap setiap kegiatan penyuluhan pasti bagus tinji, inikah masih kurangi komunikasinya jadi memntingkan ego masing-masing, didinas kesehatan bilang lakukan ini dan dinas lain bilang janganmi lakukan nda pentingji jadi kita juga pusingmi."(Hasil Wawancara ibu IR Rabu 04 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kerjasama dapat dipahami dan disimpulkan bahwa kerjasama tim dalam konteks informasi sangat penting dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan utamanya menghindari diskomunikasi disetiap lembaga agar setiap kegiatan dapat berjalan lancar berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa kerjasama dalam penyuluhan KB setiap lembaga khususnya pegawai perlu adanya koordinasi dalam setiap pelayanan dan setiap

kerjasama diselesaikan sesuai tupoksi yang ada ,persoalan kerjasama dalam kompetensi setiap individu berbeda karakter, ada yang sudah bisa karena pengalaman dan masih ada yang masih kurang pengalaman kegiatan penyuluhannya, disamping itu tanggung jawab tim sangat penting diperhatikan yang secara keseluruhan namun disamping itu kerjasama bertukar informasi dalam setiap kegiatan penyuluhan sangat penting dilakukan. kendala yang sering dihadapi adalah diskomunikasi informasi setiap pegawai dalam kegiatan penyuluhan KB dan dalam kerjasama menyatukan banyak karater itu juga sulit jadi perlu adanya pertukaran informasi agar setiap kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan.

2. Kepercayaan

Kepercayaan yang disebut *trust* adalah keyakinan bahwa seseorang sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Sub Bagian Umpeg Dinas Kesehatan kabupaten gowa, mengatakan :

“Kepercayaan disini tergantung dari pengalaman kerja dan tergantung daritupoksi ataupun bidangnya dan juga tergantung pengalaman dan diklat yang pernah diikuti dalam hal yang pada diri kita masing masing individu dapat saling memengang hasil kerja kami begitu yang ada untuk mendapatkan hasil yang baik ” (Hasil Wawancara IK Rabu 27 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Kepercayaan dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam setiap kegiatan berjalan lancar apabila yang menjalankan mempunyai pengalaman kerja dan pengalaman diklat yang mamadai untuk mengetahui upaya anda di lihat dari pekerjaan bukan

hanya itu juga akan lebih muda percaya pada diri sendiri ketika mengetahui bahwa orang lain juga percaya jika anda sudah berusaha namun merasa tidak adanya kesinambungan antar upaya dan pengakuan , jangan putus asa karena pada akhirnya membuat atasan melihat bahwa melakukan pekerjaan dengan baik akan jauh lebih berharga di bandingkan kata-kata. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa, mengatakan :

“Persoalan kepercayaan ada yang sudah cukup kompeten dan ada juga masih perlu mengikuti banyak kegiatan penyuluhan maksud saya banyak pengalaman lah dan bisa menyertai keikhlasan hati untuk menjalankan setiap pekerjaan dalam satu tujuan” (Hasil Wawancara SO Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kepercayaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan kepercayaan perlu adanya kepercayaan yang bersifat kompeten dan yang belum kompeten perlu adanya pelatihan berupa tambahan kegiatan ataupun pengalaman. Selanjutnya hasil wawancara selaku sekretaris di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa, mengatakan :

“tindakan kepercayaan diri juga harus sinkron dengan standard operasional procedur (SOP) jadi mereka tugas utamanya kan menyuluh seperti mengadakan advokasi penyuluham kepada masyarakat utamanya kepada pasangan usia subur dan kalau kita lihat dari masyarakat responnya cukup baik nah disitumi kita bisa lihat partisipasi mereka.” (Hasil Wawancara ibu KA Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kepercayaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam kepercayaan diri harus disesuaikan dengan standaritas procedur yang ada, melihat tugas terhadap

penyuluhan dan bertanggung jawab penuh terhadap masing-masing tugas.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku kepala posyandu ,mengatakan :

“untuk kepercayaan yah harus percaya dan yakin dong bahwa tugas program KB itu adalah program yang wajib dilaksanakan dengan baik karena sangat bermanfaat kepada bangsa dan negara.”(Hasil Wawancara ibu IR Rabu 04 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kerjasama dapat dipahami dan disimpulkan bahwa kepercayaan harus yakin agar tugas program KB itu berjalan sesuai dengan tujuannya karena sangat berguna bagi bangsa dan negara.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa kepercayaan dalam setiap kegiatan berjalan lancar apabila yang menjalankan mempunyai pengalaman kerja dan pengalaman diklat yang memadai. perlu juga adanya kepercayaan yang bersifat kompeten dan yang belum kompeten perlu adanya pelatihan berupa tambahan kegiatan ataupun pengalaman. kepercayaan diri harus disesuaikan dengan standaritas procedur yang ada, melihat tugas terhadap penyuluhan dan bertanggung jawab penuh terhadap masing-masing tugas.

3. Kekompakan

Kekompakan adalah berkerjasama bersatu padu,teratur dan rapi dalam menghadapi suatu pekerjaan yang ditandai adanya saling tergantung satu sama lain.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku Kepala Sub Bagian Umpeg Dinas Kesehatan kabupaten gowa, mengatakan :

“untuk kekompakan itu mutlakji setiap institusi dan kalau budaya kami disini itu kekompakan adalah keharusan atau kewajiban bekerjasama antara satu dengan lainnya” (Hasil Wawancara IK Rabu 27 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Kekompakandapat disimpulkan bahwa kekompakan adalah hal mutlak disetiap institusi untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa, mengatakan :

“yah alhamdulillah ada yang kompak dan ada yang menyeleweng dari kerjasama tapi secara umum mereka kompak kalau ada kegiatan karena dibenturkan saling ada ketergantungan terhadap tugas masing-masing karena adanya itu maka mau tidak mau mereka harus kompak” (Hasil Wawancara SO Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kepercayaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan kekompakan secara umum telah kompak meskipun ada beberapa hal kecil yang menyeleweng tapi karena prinsip kerja yang diberikan saling mempunyai ketergantungan maka harus dibutuhkan kekompakan dan kerjasama.Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku sekretaris di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gowa,mengatakan :

“Komitmen dalam kekompakan cukup tinggi terhadap program dan mereka yang sudah berpengalaman harus jadi contoh terhadap yang masih baru.” (Hasil Wawancara ibu KA Senin 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kekompakandapat dipahami dan disimpulkan bahwa komitmen dalam kekompakan harus tinggi dan yang berpengalaman perlu jadi contoh terhadap

yang belum banyak pengalamannya. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku kepala posyandu ,mengatakan :

“inikan memang bukan hasil kerja perorangan tapi hasil kerja kelompok atau tim makanya harus ditanamkan bahwa ini bukan kerjasama tim melainkan kelompok tetapi lagi-lagi karena adanya prinsip perorangan maka kekompakan dalam tim selalu rancuh .”(Hasil Wawancara ibu IR Rabu 04 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator kekompakandapat dipahami dan disimpulkan bahwaprinsip perorangan sering dijadikan budaya setiap pegawai ataupun instansi sehingga kerjasama tim sering mengalami kendala dan nilai kekompakan diselewengkan.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa kekompakan adalah hal mutlak disetiap institusi untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, berkaitan persoalan kekompakan secara umum telah kompak meskipun ada beberapa hal kecil yang menyeleweng tapi karena prinsip kerja yang diberikan saling mempunyai ketergantungan maka harus dibutuhkan kekompakan dan kerjasama akan tetapi prinsip perorangan sering dijadikan budaya setiap pegawai ataupun instansi sehingga kerjasama tim sering mengalami kendala dan nilai kekompakan diselewengkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana Di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

- a. kerjasama dalam penyuluhan KB setiap lembaga khususnya pegawai perlu adanya koordinasi dalam setiap pelayanan dan setiap kerjasama diselesaikan sesuai tupoksi yang ada, persoalan kerjasama dalam kompetensi setiap individu berbeda karakter, ada yang sudah bisa karena pengalaman dan masih ada yang masih kurang pengalaman kegiatan penyuluhannya, disamping itu tanggung jawab tim sangat penting diperhatikan yang secara keseluruhan namun disamping itu kerjasama bertukar informasi dalam setiap kegiatan penyuluhan sangat penting dilakukan. kendala yang sering dihadapi adalah diskomunikasi informasi setiap pegawai dalam kegiatan penyuluhan KB dan dalam kerjasama menyatukan banyak karakter itu juga sulit jadi perlu adanya pertukaran informasi agar setiap kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan.
- b. kepercayaan dalam setiap kegiatan berjalan lancar apabila yang menjalankan mempunyai pengalaman kerja dan pengalaman diklat yang memadai. perlu juga adanya kepercayaan yang bersifat kompeten dan yang belum kompeten perlu adanya pelatihan berupa tambahan kegiatan

ataupun pengalaman. Kepercayaan diri harus disesuaikan dengan standaritas procedur yang ada, melihat tugas terhadap penyuluhan dan bertanggung jawab penuh terhadap masing-masing tugas.

- c. Kekompakan adalah hal mutlak disetiap institusi untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. berkaitan persoalan kekompakan secara umum telah kompak meskipun ada beberapa hal kecil yang menyeleweng tapi karena prinsip kerja yang diberikan saling mempunyai ketergantungan maka harus dibutuhkan kekompakan dan kerjasama. akan tetapi prinsip perorangan sering dijadikan budaya setiap pegawai ataupun instansi sehingga kerjasama tim sering mengalami kendala dan nilai kekompakan diselewengkan.

2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan atensinya terhadap Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana.
2. Seharusnya perekrutan tenaga ahli (SDM yang berkompeten, jujur dan adil) diutamakan kepada proses perekrutan dan pembentukan panitia Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana.
3. Sebaiknya didalam Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana dapat lebih di tingkatkan pengawasannya hingga kerjasama tim dijunjung tinggi.
4. Seharusnya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (panitia) Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana ini,

diadakan pelatihan atau seminar yang mengkaji tentang aturan dan hukum yang berlaku dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. seharusnya pula peningkatan dari segi kualitas aturan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anantayu, sapja.2011. Kelembagaan Petani: peran dan strategi pengembangan kapasitas.
- Baron & Byrne.(2000). Social psychology. (gth edition). Massnchusettsi A Pearson Education company.
- Baziad,A.2008. KontrasepsiHormanal. Jakarta :PtBinaPustakaSarwono
- Badan Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. 2013. Umpan balik hasil pelaksanaan program kb nasional/kabupaten boyolali: boyolali:BP3 AKB.
- BKKBN,2009. Pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jakarta : direktorat biro hukum, organisasi dan tata laksana.
- Bowo, Andi.2007. kerjasama. yogyakarta. Pustaka Larasati.
- Dr.Muhammad Jafar Hafshah. (2000). Kemitraan usaha : konsepsi dan strategis. Pustaka sinar harapan : jakarta.
- Effendy.2003. ilmu teori dan filsafat komunikasi, bandung: PT,Citra Aditya Bakti.
- Herlianto,D. 2008. Ledakan pertumbuhan penduduk: keluarga berencana tetap menjadi kunci. Diakses 11 februari 2018: <http://www.media-indonesia.com/rubrik/arsipaktual>.
- Hessel J, Terjesen S. 2008. Enterprened carrier capital, Innovation and new venture Export Orientasi. New jersey : Prentice Hall.
- Hartanto .H. 2002, keluarga berencan dan kontrasepsi, Jakarta: pustaka sinar Harapan.
- Johnson. (2010). Buku ajar keperawatan keluarga.yogyakarta: nuha medika.
- Kusnadi.2002. masalah, kerjasama, konflik dan kinerja (kontemporer dan islam). Penerbit taroda.malang.
- Kaban, Y.T. (2004). Enam dimensi strategi administrasi publik: konsep, teori, dan isu. Yogyakarta: gava media.
- Moekijat,2002. Dasar-dasar motivasi.pionis jaya, jakarta.

Mukti Ali. 2000. Agama Keluarga Berencana dan Kependudukan. Jakarta: BKKBN.

Mudiyono , dkk. 2005. di mense-mense masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat . jogjakarta : AMPD Pres.

Nugroho T. Buku ajar obsteri, untuk mahasiswa kebidanan. Jogjakarta: Muha Medika: 2010.

Prawirohardjo, Sarwono. 2007. Ilmu kebidanan. Jakarta : Pt Binapustaka Sarwono

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen publik. PT Gramedia Widia sarana Indonesia: Jakarta.

Roestiyah. 2008. Strategi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta

Saifuddin. 2003. Sikap Manusia, Teori dan pengukurannya, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Subakti, Ramlan. 2010. memahami ilmu politik. Gramedia pustaka utama. Jakarta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung Alfabeta.

Samani, Muchlas, hariyanto. 2011. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung Remaja Rosdakarya.

Surbakti, Ramlan. 2010. memahami ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Siswosuharjo dan Chakrawati. 2010. Panduan Super Lengkap Hamil Sehat. Semarang: Pesona Plus. B.

West, Michael. 2002. kerjasama yang efektif. cetakan kelima. Penerjemahan:

Srikandi Waluyo. yogyajakrt a: penerbitkanisius.

Yuhedi LT, Kurniawati T. Buku Ajar Kependudukan dan pelayanan KB. Jakarta: EGC. 2013.

Internet

Davis (dalam Dewi, tahun 2006) "psychologymania" pengertian kerjasama, diakses dari: <http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerjasama.html>. Pada tanggal 27 April 2017 pukul 19.15

BKKBN Gorontalo. 2012. Manfaat Utama Keluarga Berencana. Diakses: 22 April 2015. <http://gorontalo.bkkbn.go.id/>.

Perundang-undangan

UUD No 56 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, kedudukan dan fungsi serta tata kerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga.



L



R

A

N

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18568/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2084/05/C.4-VIII/VI/37/219 tanggal 26 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : WAHYUNINGSIH
Nomor Pokok : 10561 04756 13
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 01 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 01-07-2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 15 Juli 2019

Nomor : 070/1027 /BKB.P/2019
Lamp : -

Kepada
Yth. 1.Ka. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.Ka. Dinas Kesehatan
3.Ka. Badan Kependidikan Perempuan
Di-

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 19253/S.01/PTSP/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : WAHYUNINGSIH
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 13 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Jl. Karunrung Raya

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN GOWA"

Selama : 01 Juli s/d 01 Agustus 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN
SEKRETARIS,


DRS. ALWI ARIFIN, M.Si
Pangkat Pembina Tk. I
19670808 198811 1 001

embusan :

Bupati Gowa (sebagai laporan);
Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
Yang Bersangkutan ;
Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN
KELUARGA BERENCANA
(DPP DAN KB)

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tlp. (0411) 866569 Sungguminasa 92111

SURAT - KETERANGAN

Nomor: 476/523 /DPP dan KB

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa menerangkan bahwa:

Nama : Wahyuningsih
N i M : 10561 04756 13
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Sosial Politik (Sospol)

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 01 Juli s/d 01 September 2019 dengan judul **"KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN GOWA"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Sungguminasa, 07 Desember 2019

Kepala Dinas PP dan KB



Sofyan, D.S. Sos. MM

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip. : 19670822 199103 1 014

No	KECAMATAN	PPM PB	PPM PB Manunggal Kb-Kes	MIX KONTRASEPSI							NON MJP	
				IUD	MOW	IMP	STK	PIL	MOP	KDM		MJP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	Bontonompo	800	480	16	2	133	220	107	0	1	151	329
2.	Bajeng	1576	946	32	4	262	434	212	0	2	297	684
3.	Tompobulu	860	516	17	2	143	237	116	0	1	162	354
4.	Tinggimancong	474	284	9	1	79	131	64	0	1	89	195
5.	Parangloe	341	205	7	1	57	94	46	0	1	64	140
6.	Bontomarannu	863	518	17	2	143	238	116	0	1	163	355
7.	Pallangga	2142	1.285	43	5	356	590	288	0	3	404	881
8.	Somba Opu	2433	1.460	49	6	404	670	327	0	4	459	1.001
9.	Bunaya	361	216	7	1	60	99	48	0	1	68	148
10.	Biringbulu	945	567	19	2	157	261	127	0	1	178	389
11.	Tobaloppoa	779	467	16	2	129	215	105	0	1	147	320
12.	Baronmbong	1022	613	20	2	170	282	137	0	2	193	420
13.	Pattalassang	523	314	10	1	87	144	70	0	1	99	215
14.	Manuju	445	267	9	1	74	123	60	0	1	84	183
15.	Bt.Lempanangan	443	266	9	1	74	122	60	0	1	84	182
16.	Bt Nompo Sel	706	424	14	2	117	195	95	0	1	133	290
17.	Bajeng Barat	541	325	11	1	90	149	73	0	1	102	223
18.	Paringi	230	138	5	1	38	63	31	0	0	43	95
	JUMLAH	15.483	9.290	310	37	2.573	4.267	2.080	0	23	2.920	6.370

Sungguminasa, 16 Maret 2018

Ka. Dinas PP dan KB Kab. Gowa

SOFYAN DAUD, S.Sos

Nip. 19670822 199103 1 014

PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT MENJADI PESERTA KB AKTIF (PPM-PA)
MENURUT KABUPATEN DAN JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2019

D	KECAMATAN	PUS LAPANGA N	PUS PROY	PPM CU	% PA/PUS	IUD	MOP	MOW	IMP	STK	PIL	KDM	MKJP	NON MKJP	PA PRIA	%PPM M
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bontonompo	6920	7325	3751	51,2	107	4	148	416	2425	613	37	675	3076	41	18,00
	Bajeng	11802	12492	6397	51,2	183	6	2253	710	4135	1046	64	1152	5246	70	18,00
	Tompobulu	5526	5849	2995	51,2	86	3	118	332	1936	490	30	539	2456	33	18,00
	Tinggimancong	3775	3996	2046	51,2	58	2	81	227	1323	335	20	368	1678	22	18,00
	Parangloe	3155	3339	1710	51,2	49	2	68	190	1106	280	17	308	1402	19	18,00
	Bontomarannu	6114	6471	3314	51,2	95	3	131	368	2142	542	33	597	2717	36	18,00
	Pallangga	17380	18396	9421	51,2	269	9	372	1045	6090	1541	94	1696	7725	103	18,00
	Somba Opu	19257	20383	10438	51,2	298	10	413	1158	6748	1707	104	1879	8559	115	18,00
	Bunaya	3811	4034	2066	51,2	59	2	82	229	1335	338	21	372	1694	23	18,00
	Biringbulu	7686	8135	4166	51,2	119	4	165	462	2693	681	42	750	3416	46	18,00
	Tobaloppoa	4960	5250	2689	51,2	77	3	106	298	1738	440	27	484	2205	29	18,00
	Baronmbong	7363	7793	3991	51,2	114	4	158	443	2580	653	40	718	3273	44	18,00
	Pattalassang	4786	5066	2594	51,2	74	3	103	288	1677	424	26	467	2127	28	18,00
	Manuju	2953	3126	1601	51,2	46	2	63	178	1035	262	16	288	1312	18	18,00
	Bt.Lempanangan	3333	3528	1807	51,2	52	2	71	200	1168	295	18	325	1481	20	18,00
	Bt Nompo Sel	5519	5842	2992	51,2	85	3	118	332	1934	489	30	539	2453	33	18,00
	Bajeng Barat	4509	4773	2444	51,2	70	2	97	271	1580	400	24	440	2004	27	18,00
	Paringi	2970	2720	1393	51,2	40	1	55	155	901	228	14	251	1142	15	18,00
	JUMLAH	121419	128518	65814	51,2	1880	65	2601	7302	42545	1076	657	11844	53966	722	18,00
											4		8			

bel di atas menunjukkan peserta KB pada tahun 2018 (6.370) dan pada tahun 2019 (18.00) bahwa dapat di artikan jumlah peserta KB meningkat .

Ka. Dinas PP dan KB Kab. Gowa

SOFYAN DAUD, S.Sos

Nip. 19670822 199103 1 014

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



RIWAYAT HIDUP



WAHYUNINGSIH Lahir pada tanggal 13 Juni 1995 di Ujung Pandang. Anak Pertama dari 2 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Syamsuddin T dan Ramlah. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SD Inpres Kaluku Bodoa dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 22 Makassar dan tamat pada tahun 2008. Setelah tamat, penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN Datuk Ribandang dan tamat pada tahun 2012. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2013 penulis berhasil lulus di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan di tahun 2020 penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama Antara Lembaga dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) .